

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perekonomian merupakan hal yang tak bisa lepas dari kehidupan manusia. Problematika ekonomi manusia berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Ia selaras juga dengan semakin kompleksnya interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Adanya pertumbuhan dan perkembangan dinamika ekonomi itu bisa kita amati dari wujudnya yang semula hanya merupakan kebutuhan yang bersifat individu, dan mungkin bisa dipenuhi secara individu pula. Akan tetapi ketika ia diposisikan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan adanya hubungan, kerjasama dan bantuan dari orang lain, kehidupan ekonomis seseorang akan lebih kompleks dan memunculkan berbagai permasalahan.

Kegiatan ekonomi pada masa sekarang bisa dikatakan telah mencapai sebuah tatanan ekonomi yang global, dan terjadi globalisasi ekonomi.¹ Globalisasi ini menggiring kita untuk membahas masalah ekonomi tidak hanya dari satu aspek saja. Dengan munculnya globalisasi, seluruh aspek kehidupan sosial sebagian besar telah ditentukan oleh proses global itu sendiri. Kita berada di zaman dimana garis-garis batas budaya nasional, ekonomi

¹ Globalisasi ekonomi menurut definisi yang diberikan oleh OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development) adalah proses penciptaan pasar dan produksi di berbagai negara menjadi terus menerus bergantung satu sama lain sebagai akibat dari dinamika perdagangan barang dan jasa, gerak kapital dan teknologi. Hans Kung, *A Global Ethics for Global Politics and Economics*, Terj. Ali Noer Zaman "Etika Ekonomi-Politik Global; Mencari Visi Baru Bagi Kelangsungan Agama di Abad XXI", Yogyakarta: Qalam, 2002, hlm. 273.

nasional dan wilayah nasional semakin kabur.² Hal demikian tentunya membawa konsekuensi logis berupa laju arus politik, ekonomi, teknologi, budaya dan lainnya menjadi lebih cepat dan sangat mungkin saling mempengaruhi satu negara dengan yang lain.

Meskipun para pendukung liberalisasi perdagangan yakin, bahwa dengan adanya liberalisasi akan menciptakan kesejahteraan yang belum pernah terwujud, yakni ekonomi global yang lebih maju dibandingkan dengan ekonomi nasional yang terbatas, sebagaimana ekonomi nasional lebih maju dibandingkan dengan ekonomi lokal, pengetahuan global yang melintasi nasionalitas yang menggunakan orang, perlengkapan dan keuangan dari beberapa negara dapat bekerja secara lebih murah, efektif dan efisien, serta kemajuan yang pesat di bidang informasi dan teknologi. Akan tetapi liberalisasi perdagangan juga tidak bisa lepas dari aspek-aspek kontroversial dan negatif yang nyaris bisa menghilangkan manfaat yang ingin dicapai.³ Jadi, selain kebebasan dan liberalitas ini betul-betul menciptakan kemungkinan yang baru, ia juga sekaligus memunculkan kesulitan yang baru, terutama untuk kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi pada tingkat nasional.⁴

Kehadiran globalisasi bagaikan tamu tak diundang, yang mau tidak mau harus dijemput oleh seluruh negara di dunia. Ada sebagian golongan negara yang menjemputnya dengan optimis (karena mereka mempunyai

² Paul Hirst dan Grahame Thompson, *Globalization ini Question*, Terj. P. Soemitro "Globalisasi Adalah Mitos: Sebuah Kesangsian terhadap Konsep Globalisasi Ekonomi Dunia dan Kemungkinan Aturan Mainnya", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 1

³ Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work*, Terj. Edrijani Azwardi "Making Globalization Work; Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil", Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007, hlm. 122

⁴ Hans Kung, *Op.cit.*, hlm. 277

kekuatan dan ketahanan yang cukup), dan ada sebagian lagi yang menghadapinya dengan pesimis dan cemas (yaitu negara yang masih memiliki ketergantungan secara ekonomi terhadap negara-negara maju), karena paling tidak telah muncul dua pilihan dampak yang timbul akibat globalisasi, yaitu baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan, serta efek positif dan negatif. Namun pada intinya yang harus kita sadari adalah pada masa sekarang transisi dari ekonomi nasional ke ekonomi global benar-benar terjadi dalam tempo yang sangat singkat.⁵ Dunia perekonomian yang sudah masuk dalam jaringan global telah melibatkan setiap negara untuk masuk ke dalamnya. Akibat penting konsep globalisasi adalah dilumpuhkannya strategi reformasi radikal di tingkat nasional, strategi nasional dianggap tidak mungkin dapat dijalankan.

Inilah yang kemudian menjadi alasan bagi kita untuk memikirkan kembali posisi kita dalam percaturan ekonomi global yang demikian. Lebih jauh tantangan global tidak hanya harus dihadapi oleh negara, akan tetapi juga dihadapi setiap orang dan swasta yang berada di negara tersebut.

Sistem ekonomi global mengindikasikan adanya penyebaran sistem pasar bebas yang sarat dengan kapitalisme. Dengan demikian, globalisasi memiliki visi penyebaran kapitalisme pasar bebas (liberalisasi perdagangan) ke setiap negara.⁶

Sistem ekonomi yang sarat dengan ideologi kapitalisme, dalam ilmu ekonomi digolongkan dalam ajaran ekonomi yang pertama kali diletakkan

⁵ Hans Kung, *Op.cit.*, hlm. 274

⁶ Thomas L. Friedman, *Understanding Globalization: The Lexus and The Olive Tree*, Terj. Tim Penerbit ITB "Memahami Globalisasi; Lexus dan Pohon Zaitun", Bandung: Penerbit ITB, 2002, hlm. 9

oleh Adam Smith (1723-1790), yang dikenal dengan sistem ekonomi liberal. Dasar ekonomi liberal mengacu pada kebebasan pasar, dimana mekanisme pasar murni beserta kompetisinya merupakan instrumen yang paling berhak mengatur segalanya. Dalam mekanisme pasar murni, negara atau pemerintah sama sekali tidak boleh mengaturnya.⁷ Namun kenyataan sejarah membuktikan bahwa sistem ekonomi liberal ala Smith dalam beberapa aspek kehidupan belum mampu mewujudkan kesejahteraan. Secara ironis, Joseph E. Stiglitz⁸ menggambarkan sistem ekonomi liberal hanya akan menjanjikan bahwa yang mendapat keuntungan adalah negara secara keseluruhan (bukan orang per orang). Liberalisasi akan melahirkan negara kaya dengan penduduk miskin.

Setelah sistem ekonomi liberal, kemudian disusul dengan gagasan aliran sosialis yang diusung oleh Karl Marx (1818-1883) karena keprihatinannya terhadap keganasan sistem kapitalisme.⁹ Namun perjalanan sistem sosialisme yang sudah diterapkan di negara Uni Soviet selama hampir 70 tahun pun ternyata mengandung kekeliruan. Pada tahun 1985 merupakan *starting point* bagi perubahan dramatis dalam blok negara-negara komunis. Presiden Mikhail Gorbachev mengadakan reformasi yang radikal dalam struktur perekonomian Uni Soviet. Hal itu dilakukan karena sistem ekonomi

⁷ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta:BPFE, 2000, hlm. 3

⁸ Joseph E. Stiglitz adalah peraih nobel ekonomi pada tahun 1998. Lihat: Joseph E. Stiglitz, *Op.cit.*, hlm. 124

⁹ Mubyarto, *Op.cit.*, hlm. 8

sosial yang terpusat pada pemerintah tidak mampu meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁰

Pengalaman-pengalaman sejarah ini tentunya memberikan pelajaran bagi kita. Upaya untuk mencapai kesejahteraan manusia terkadang tidak bisa menghindarkan ketidakadilan dan penyimpangan terhadap hak-hak asasi manusia. Inilah yang kemudian harus dipikirkan kembali, ketepatan antara kesejahteraan (sebagai tujuan) dengan upaya (cara) untuk memperolehnya. Tentunya pembicaraan ini adalah dalam lingkup tatanan sebuah negara, dimana kelompok dari individu dan masyarakat terikat oleh aturan hukum sebuah negara. Dilema yang akan kita hadapi dalam hal ini adalah hubungan antara mekanisme pasar dengan posisi peran pemerintah.

Gambaran tentang pentingnya relasi antara dua elemen tersebut dengan baik didasari oleh alasan yang diberikan oleh Paul Hirst dan Grahame Thompson, bahwa sistem ekonomi yang mengglobal membawa persoalan krusial. Institusi pasar tanpa mekanisme pemerintahan akan berkembang dalam tatanan yang amat riskan, tidak adil, mendekati hukum rimba, dan sulit mengakomodasikan nilai-nilai moral serta etika. Institusi pasar pada tingkat nasional senantiasa berkembang berdampingan dengan institusi negara atau pemerintahan. Dalam kenyataannya, tidak mungkin institusi pasar berkembang tanpa pengaturan yang dikeluarkan oleh negara.¹¹ Kondisi ini merupakan sebuah kenyataan di satu sisi.

¹⁰ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Cet. 2, 2000, hlm. 192

¹¹ Paul Hirst dan Grahame Thompson, *Op.cit.*, hlm. xxi

Pada sisi lain, kehadiran pemerintah (mencampuri urusan) dalam mekanisme pasar juga dipotret oleh sebagian kelompok sebagai penghambat dan menjadikan jalannya mekanisme pasar tidak bebas. Arah dan kontrol negara terhadap pasar bebas disinyalir akan memberikan dampak negatif pada ekonomi. Inflasi, pengangguran, resesi, bahkan depresi adalah di antara dampaknya.¹² Inilah faktor pendorong untuk menentukan sebuah pola pengaturan wilayah ekonomi (sistem ekonomi) yang harus diambil oleh sebuah negara dalam tugasnya sebagai pemegang tanggungjawab dan wewenang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Antara apakah pemerintah akan memberikan kebebasan terhadap pasar untuk menjalankan mekanismenya sendiri, ataukah ia ikut terlibat dalam mekanisme pasar.

Dalam memandang permasalahan ini, ada baiknya kita menarik sebuah benang merah bahwa krisis merupakan bagian nyata dalam perjalanan sistem pasar. Kesejahteraan yang ingin dicapai oleh manusia mengalami benturan antara “kesejahteraan individu” dan “kesejahteraan masyarakat atau publik”. Dengan pengalaman gagal teori ekonomi konvensional (yang secara garis besar diwakili oleh dua aliran: kapitalis dan sosialis) untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, muncullah teori ekonomi yang ditawarkan oleh sementara pihak sebagai alternatif di antara yang menyeimbangkan kedua sisi aliran tersebut, yaitu ekonomi Islam.¹³

¹² Hans Kung, *Op.cit.*, hlm. 315

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 13

Sebagai suatu sistem kehidupan yang komprehensif, Islam dipercayai oleh pemeluknya sebagai ajaran yang secara umum mengarahkan manusia untuk mencapai kesejahteraan dua dimensi, yaitu dunia dan akhirat. Islam mempunyai visi menjadi agama yang bisa menjadi rahmat (رحمة) bagi orang-orang beriman¹⁴. Selain meletakkan dasar-dasar teologi, akidah, dan ibadah, Islam juga memberikan petunjuk dalam bidang ekonomi. Islam mendorong ummatnya untuk aktif dalam berusaha (*enterprise*) dalam rangka mencari kesejahteraan hidup di dunia¹⁵. Islam memberikan batasan-batasan interaksi manusia dalam kegiatan ekonomi. Dimana ia meletakkan dasar keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua rakyat sebagai tanggungjawab pemerintah¹⁶ sebagai pemegang amanat rakyat. Islam juga mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan yang bersifat materi dengan keharusan menjaga moralitas dan akhlaq yang benar, sehingga akan terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁷ Di sisi lain Islam tetap mengakui kebebasan individu dalam kegiatan ekonominya, dengan batasan tidak melanggar kepentingan dan merusak hak orang lain. Hukum ekonomi Islam mengajarkan adanya keharmonisan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial atau publik. Dan institusi Negara merupakan lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

¹⁴ Q.S. al-A'raf (7):52

¹⁵ Q.S al-Jumu'ah (62):10

¹⁶ Khursid Ahmad Ed., *Studies in Islamic Economics*, Jeddah: International Centre for Research in Islamic Aconomics King Abdul Aziz University, 1976, hlm. 144

¹⁷ Amir Mu'allim, dkk., *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: MSI UII-Safiria Insania Press, 2008, hlm. 59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.... (النساء: 58)

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil...” (Q.S. 4:58)¹⁸

Secara ideal memang telah ada nilai-nilai dan tatanan yang ditujukan untuk mewujudkan keharmonisan interaksi sosial manusia. Akan tetapi nilai-nilai ideal tidak semuanya bisa direalisasikan secara sempurna. Demikian juga halnya dalam permasalahan perekonomian. Dalam percaturan ekonomi di tingkat global (yang tidak mungkin dihindari oleh setiap negara), negara seolah kehilangan kekuatan independen untuk menentukan kebijakan ekonomi dalam negeri, dan walaupun bisa tentu dengan pertimbangan yang sangat sulit. Kapitalisme global telah merasuk ke dalam kepentingan politik negara, yang kemudian melahirkan kapitalisme politik.¹⁹ Sehingga posisi negara yang semestinya menjadi pelindung rakyat justru berbalik mengintervensi mekanisme pasar dengan kebijakan-kebijakan yang mengandung tujuan mencari kepentingan kelompok atas. Sementara tidak menutup kemungkinan, jika negara atau pemerintah lepas tangan dari mekanisme pasar, dengan membebaskan kompetisi terbuka antar pelaku ekonomi (yang berprinsip pada hukum asal bahwa setiap individu diakui kebebasannya dalam berusaha), juga

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 87

¹⁹ Istilah Kapitalisme Politik merupakan perluasan dari kapitalisme ekonomi. Kapitalisme pada masa sekarang telah memiliki makna yang lebih luas dan kompleks. Ia tidak hanya berkisar pada tatanan ekonomi belaka, akan tetapi juga pada tatanan politik. Jika dalam teori ekonomi kapitalis, negara (pemerintahan) adalah musuh pasar, akan tetapi sekarang justru menjadi agen yang melancarkan ideologi kapitalis. Lihat: Edy Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia; dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 13

akan menjadi dilema berkepanjangan. Kesenjangan, ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi tidak dapat dihindari.

Atas dasar inilah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran (intervensi) ideal negara untuk turut menciptakan kondisi mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan dari sudut pandang ekonomi Islam.. Sebenarnya konsep ekonomi Islam bukanlah hal yang baru. Akan tetapi teori ekonomi Islam telah berkembang dimulai dari turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung masalah ekonomi, seperti: Q.S. Al-Baqarah ayat ke 275 dan 279 tentang jual beli dan riba, dan ayat 282 tentang pembukuan transaksi, dan lain sebagainya.²⁰

Teladan yang baik dalam perjalanan sejarah ekonomi Islam dapat kita ambil dari masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab. Pemilihan tokoh ini tentu bukan tanpa alasan. Dengan melihat masa pemerintahan para *khulafaurrasyidin* adalah masa yang masih sangat dekat dengan masa Nabi Muhammad SAW. Umar Ibn Khattab adalah salah satu tokoh terkemuka dalam Islam.²¹ Di samping itu, masa pemerintahan Umar Ibn Khattab merupakan masa dimana banyak sekali dihasilkan kebijakan-kebijakan praktis, teknis dan operasional untuk sebuah negara, dan itu merupakan hasil ijtihad Umar Ibn Khattab.²²

²⁰ Amir Mu'allim, dkk., *Op.cit.*, hlm. 3

²¹ Cyryl Glassé, *The New Encyclopedia of Islam*, New York: Altamim Press, 2002, hlm. 461

²² Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari "Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab", Jakarta: Khalifa, 2003, hlm. vii

Dalam posisinya sebagai kepala negara, Umar Ibn Khattab juga mencontohkan sifat kepemimpinannya yang sangat peduli terhadap rakyat. Kepedulian itu dituangkan dengan perhatiannya dan pengawasan yang dilakukannya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat atau mekanisme pasar.²³ Sehingga pada tahap berikutnya, pada masa beliau dianggap oleh sebagian kalangan sebagai awal terbentuknya sebuah institusi pemerintahan yang bertugas mengawasi pasar atau kegiatan perekonomian di masyarakat, yaitu lembaga *Hisbah*.²⁴

Dengan latar belakang itulah, penulis ingin menyusun sebuah penelitian lebih jauh tentang pola ideal intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar menurut Islam, dengan merujuk pada konsep pengawasan pasar yang dilakukan oleh lembaga *Hisbah* pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab. Dengan rumusan judul **“STUDI ANALISIS PERAN LEMBAGA *HISBAH* PADA MASA PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR IBN KHATTAB”**.

II. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, pertanyaan pokok yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran Lembaga *Hisbah*
2. Bagaimanakah Peran Lembaga *Hisbah* pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab.

²³ Abi al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad ibn al-Jauzi, *Manaqib Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet.3, 1987, hlm. 66

²⁴ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.cit.*, hlm. 588

III. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Bagaimanakah peran Lembaga *Hisbah*
2. Mengetahui bagaimanakah Peran Lembaga *Hisbah* pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab.

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat:

1. Mempertegas dan mengingatkan kembali peran yang semestinya dijalankan oleh sebuah pemerintah dalam rangka melindungi perekonomian masyarakat untuk mencapai keadilan ekonomi. Dimana pada masa sekarang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan praktek usaha dan persaingan yang tidak sehat, yang bisa menyebabkan antara lain, stabilitas perekonomian menjadi terganggu, persaingan kompetitif yang tidak sempurna, praktek monopoli yang merugikan, dan lain-lain.
2. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman khususnya dalam bidang ekonomi Islam, serta mewujudkan hukum ekonomi Islam yang progressif

IV. Telaah Pustaka

Kajian tentang ekonomi, khususnya ekonomi Islam telah menjadi kajian yang cukup menarik dan cukup serius. Tidak sedikit ilmuwan dan pakar ekonomi yang secara mendalam memberikan perhatian terhadap perkembangan ekonomi Islam. Akan tetapi, dari pengamatan yang dilakukan penulis (meskipun masih dalam lingkup terbatas), penelitian ilmiah yang

secara spesifik mengungkap langsung mengenai konsep intervensi negara dalam mekanisme pasar menurut teori ekonomi Islam masih sulit ditemukan. Adapun dalam khazanah buku teks dan beberapa penelitian ilmiah yang membahas masalah ekonomi Islam yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain:

Buku karangan M. Arskal Salim GP.: *Etika Intervensi Negara; Perspektif Etika Politik Ibnu Taymiyah* (Jakarta, Logos, 1998). Sebuah sentuhan yang tajam diberikan oleh pengarang buku ini dalam memandang keterkaitan antara negara dengan proses pembangunan ekonomi. Meskipun secara mendalam buku ini mengkaji dengan spesifik terhadap pemikiran Ibnu Taymiyah, namun landasan berfikir secara politik tetap membantu penulis untuk melihat peran negara dalam mekanisme perekonomian. Dimana memang disebutkan bahwa politik, ekonomi, dan agama ketiganya terkait dalam sebuah sistem yang menyatu.

“Sejarah para umat dan raja” yang ditulis oleh Ali Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari dalam karyanya “*Tarikh al-Umam wal-Muluk*” (Beirut, Dar al-Fikr, t.th.) juga menggambarkan pola dan sifat kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Khattab yang sangat bijak dalam mengawasi kegiatan perekonomian di negara. Digambarkan bahwa secara langsung Khalifah Umar Ibn Khattab memberikan perhatian terhadap kondisi dan permasalahan yang terjadi di dalam pasar. Dan ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaba sebagai pemimpin negara. Yang belum ada (dan nantinya akan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini) adalah kajian yang

komprehensif dan lengkap mengenai lembaga pengawas pasar yang dibentuk oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Akan tetapi kajian di dalamnya (yang berkaitan dengan Khalifah Umar Ibn Khattab) hanya merupakan deskripsi historis yang diuraikan pada batas permukaan saja.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rulmiyadi (Fakultas Syari'ah, NIM 2102301/2007) yang berjudul "Prinsip-prinsip Pengelolaan Bait al-Mal (Studi Analisis Terhadap Pendapatan dan Belanja Kas Pemerintahan Islam di Masa Khalifah Umar Ibn Khattab)" juga menyajikan gambaran kebijakan-kebijakan dan sifat kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Khattab. Meskipun kajian dalam skripsi ini lebih detail pada kebijakan dalam bidang pengelolaan *Bait al-Mal*, akan tetapi temuan dalam skripsi ini sangat bisa dipahami bahwa ada beberapa nilai filosofi yang menjadi dasar dan landasan kebijakan Umar secara umum, yaitu: menunaikan amanat rakyat, berlaku adil, meratakan kesejahteraan, dan kebijakan dalam bidang ekonomi yang berupaya menghindarkan adanya praktek monopoli. Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan yang akan penulis susun adalah dalam perspektif pandangan komparatif antara teori ekonomi Islam dan teori ekonomi konvensional yang belum ada dalam skripsi tersebut. Di samping itu juga masih terdapat buku-buku lain yang belum penulis cantumkan dalam telaah pustaka di sini.

V. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan

suatu kebenaran.²⁵ Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri dan mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel, dan karangan.²⁶

2. Sumber Data

Penelitian yang penulis adakan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Sehingga sumber-sumber yang diperoleh sebagai bahan penelitian adalah berupa buku-buku dan literatur teks yang lain. Dengan demikian penulis menggunakan sumber data tersebut yang mencakup dua kategori buku, yaitu buku utama dan buku penunjang.²⁷ Buku utama adalah buku-buku yang berisi materi dan teori pokok yang relevan dengan penelitian, dan yang merupakan sumber yang sangat berguna sebagai kerangka pemikiran pelaksanaan pemikiran. Namun dalam kategori buku utama ini penulis tidak hanya menggunakan satu buah

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 194

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 24, 2007, hlm. 9

²⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.3, 1999, hlm. 109

buku saja, akan tetapi terdapat beberapa buku utama yang akan digunakan. Antara lain adalah buku “*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*” (Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Jakarta:Khalifa, 2003) dan buku “*Manaqib Amir al-Mukminin ‘Umar Ibn al-Khattab*” (Abi al-Faraj Abdurrahman ibn Ali Ibn Muhammad Ibn al-Jauzi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987)

Sedangkan buku penunjang yaitu buku-buku yang pada dasarnya sama dengan buku utama, namun di dalam buku penunjang ini bukan merupakan faktor penentu bagi pemikiran peneliti, terutama dalam menentukan kerangka dasar pemikiran langkah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada obyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁸

4. Analisis Data

a. Metode Analisis

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh.²⁹

²⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke 1, 2002, hlm. 87

²⁹ Lexy J. Moleong, *Op.cit.*, hlm. 11

b. Pendekatan

Pendekatan merupakan sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu masalah yang dikaji.³⁰ Dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari dokumentasi teks-teks dari buku dan tulisan ilmiah, penulis menggunakan dua model pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Historis

Pendekatan Historis atau sejarah mengasumsikan bahwa realitas sosial yang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan hasil proses sejarah yang terjadi pada masa sebelumnya. Permasalahan-permasalahan perekonomian, keagamaan dan fenomena sosial pada suatu waktu mempunyai keterkaitan dengan keadaan masa sebelumnya.³¹ Pendekatan historis digunakan oleh penulis karena dengan pendekatan ini bermanfaat untuk sebisa mungkin memasuki keadaan sebenarnya dari sebuah peristiwa. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penafsiran yang keluar dari konteks historisnya. Selain itu, pendekatan ini memiliki kelebihan, yaitu karena berbagai peristiwa dapat dilacak dan diketahui maksudnya dengan melihat sejarah kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat di dalamnya.³²

³⁰ U. Maman Kh., *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 94

³¹ *Ibid*, hlm. 149

³² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2003, hlm. 46

2) Pendekatan Sosiologis³³

Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan logika-logika dan teori sosiologi³⁴ untuk menggambarkan fenomena sosial serta pengaruhnya terhadap fenomena-fenomena lain. Perekonomian merupakan permasalahan yang mempunyai keterkaitan dengan interaksi sosial kemasyarakatan. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini menitikberatkan terutama pada teori pertukaran dan teori konflik.

Teori pertukaran mengasumsikan bahwa aktivitas manusia seperti perubahan dan perilaku sosial tiada lain adalah dalam rangka melakukan pertukaran yang saling menguntungkan satu sama lain, baik keuntungan materi maupun non materi. Menurut teori ini, manusia memperhitungkan untung rugi dalam transaksi sosial, dan manusia bersaing untuk memperoleh keuntungan.³⁵ Adapun teori konflik mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa individu dan kelompok yang memiliki kepentingan satu sama lain. Mereka selalu bersaing untuk kepentingan tersebut.³⁶

³³ Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia. Objek dari ilmu sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, sosial. Dalam ilmu sosiologi dipelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (seperti ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, ekonomi dengan politik dan lain sebagainya). Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 17.

³⁴ Dalam sosiologi terdapat beberapa logika teoretis (pendekatan) yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial, antara lain : fungsionalisme, pertukaran, interaksionalisme simbolik, konflik, teori penyadaran, dan teori ketergantungan. U. Maman Kh., *Op.cit.*, hlm. 128

³⁵ *Ibid*, hlm. 132

³⁶ *Ibid*, hlm. 139

VI. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah alur penelitian ini, maka penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

Bagian I: Merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

Bagian II: Merupakan bagian yang berisi tentang kerangka konseptual dan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Mekanisme Pasar yang meliputi pula sistem perekonomian akan diuraikan terlebih dahulu. Setelah itu akan diuraikan tentang mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Dan sebagai dasar untuk menjelaskan konsep *Hisbah* akan diuraikan mengenai pengertian, sejarah lembaga *Hisbah*, serta peran lembaga *Hisbah* dalam perekonomian.

Bagian III: Merupakan bagian yang berisi uraian masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab, berisi biografi, pengangkatan menjadi khalifah, dan kondisi pemerintahannya. Diikuti dengan pemaparan konsep pengawasan pasar (*Hisbah*) yang dijalankan pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab.

Bagian IV: Adalah bagian yang memuat analisis peran lembaga *Hisbah* dalam pengawasan terhadap pasar, dan analisis Peran Lembaga *Hisbah* pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab.

.Bagian V: Berisi kesimpulan dari penelitian, dan merupakan catatan refleksi penelitian dari awal sampai akhir. Disertakan pula kontribusi pemikiran menyangkut relevansi pembahasan dalam penelitian ini dengan konteks perekonomian pada masa sekarang.